

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi kasus Kantor BPKAD Kota Palopo)

Irmayanti¹, A. Dahri Adi Patra LS², Saharuddin³

Universitas Muhammadiyah Palopo

Jl. Jend Sudirman, 91922, Indonesia

Email: irmayanthi232000@gmail.com

ABSTRAK

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan cerminan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui signifikansi pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini dilakukan di Kantor BPKAD Kota Palopo. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari laporan Statistik Keuangan Pemerintah BPKAD Kota Palopo. Pengumpulan data menggunakan metode observasi nonpartisipan dengan teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian dengan menggunakan analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Belanja modal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah dan belanja modal tidak simultan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di kantor BPKAD Kota Palopo.

Kata Kunci :Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal, Kinerja keuangan

ABSTRACT

The financial performance of local governments is a reflection of the success of local governments in managing regional finances. This study aims to determine the significance of the effect of local revenue and capital expenditure on the financial performance of local governments. This research was conducted at the Palopo City BPKAD Office. The data used in this study is secondary data sourced from the Financial Statistics report of the Palopo City BPKAD Government. Data collection using non-participant observation method with the analysis technique used is multiple linear regression. The results of the study using multiple linear regression analysis show that local revenue has a negative and insignificant effect on the financial performance of local governments. Capital expenditures have a negative and insignificant effect on the financial performance of local governments. Local revenue and capital expenditures are not simultaneous to the financial performance of the local government at the Palopo City BPKAD office.

Keywords: Regional Original Income and Capital Expenditure, Financial Performance

PENDAHULUAN

Paradigma pengelolaan keuangan daerah telah mengalami perubahan yang sangat mendasar sejak ditetapkannya otonomi daerah pada tahun 2001. UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi landasan utama dalam melaksanakan otonomi daerah pada hakekatnya memberikan peluang yang lebih besar kepada daerah untuk lebih mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah,

baik menyangkut sumber daya manusia, dana, maupun sumber daya lain yang merupakan kekayaan daerah (Rochmah, 2015).

Pasal 157 Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang fungsi pemerintah daerah sebagai perangkat yang mengatur, menjalankan dan menyelenggarakan suatu pemerintahan di wilayahnya dibawa pemerintah pusat menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas : (1) hasil pajak daerah, (2) hasil retribusi daerah, (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan (4) lain-lain PAD yang sah. Sumber keuangan yang berasal dari PAD lebih penting dibanding dengan sumber yang berasal dari luar PAD karena PAD dapat dipergunakan sesuai dengan kehendak dan inisiatif pemerintah daerah demi kelancaran penyelenggaraan urusan daerahnya, sementara sumber keuangan yang berasal dari bantuan pemerintah pusat, umumnya sudah ditentukan untuk pembiayaan tertentu yang sifatnya mengikat. Kemampuan suatu daerah menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan suatu daerah. Penelitian Dian Batubara mengatakan bahwa semakin besar kontribusi PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka akan semakin kecil pula ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat (Batubara, 2009).

PAD merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, karena PAD paling berkontribusi untuk pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut. Oleh sebab itu, kemampuan suatu daerah menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut termasuk wilayah. Semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, maka akan semakin kecil pulaketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat, sehingga semakin tinggi penerimaan PAD akan memaksimalkan pemerintah daerah dalam pembangunan pemerintahan daerah yang berprinsip otonomi daerah yang nantinya akan berdampak pada kinerja keuangan pemerintah daerah yang semakin baik. Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Antari (2018) yang menyatakan bahwa peningkatan PAD dapat menyebabkan terjadinya peningkatan kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri segala kegiatan daerahnya sehingga memberikan indikasi bahwa pemerintah daerah telah memiliki kinerja yang baik (Putri & Darmayanti, 2019).

Belanja Modal merupakan pengeluaran yang bisa disebut dengan *expenditure* yang terdiri belanja rutin atau belanja operasional pemerintah daerah dalam suatu periode tertentu. Belanja tersebut dipergunakan untuk memberikan pelayanan publik sebaik-baiknya. Semakin baik pelayanan publik yang diberikan, menunjukkan semakin baik pengelolaan pembelanjaan pemerintah daerah. Pengelolaan pembelanjaan yang baik menciptakan *value for money* yang baik, sehingga penilaian akan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah menjadi baik pula (Pratiwi, 2018).

Pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberi kewenangan daerah menyusun Struktur Organisasi Perangkat Daerah kebutuhan karakteristik dan potensi yang dimiliki daerah, sehingga dengan kewenangan yang dimilikinya, daerah dapat dan mampu merespon dinamika yang ada dalam masyarakat lebih baik.

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk memastikan kemampuan daerah dalam melaksanakan aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar untuk mempertahankan layanan yang diinginkan, di mana penilaian yang lebih tinggi menjadi tuntutan yang harus dipenuhi agar pihak eksternal memutuskan untuk berinvestasi di dalam daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi suatu hal yang penting bagi pemerintah daerah dan pihak eksternal. Peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu cara dalam meningkatkan rasio kemandirian dalam suatu pemerintah daerah. Salah satu pengukuran kinerja yang dapat menggambarkan kinerja pemerintah daerah adalah pengukuran kinerja keuangan (Dwi Saraswati, Yunita Sari Rioni 2019).

Menurut Halim (2004: 24) Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah hasil dari pengukuran untuk melihat kondisi keseluruhan ketercapaian pengelolaan keuangan atau pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah. Salah satu informasi yang dapat digunakan sebagai tolok ukur kinerja adalah informasi keuangan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palopo dibentuk dengan pertimbangan agar pelaksanaan fungsi pengelolaan keuangan, penyelenggaraan penatausahaan keuangan serta pengelolaan asset daerah dapat dilaksanakan lebih optimal dengan mengacu pada seluruh potensi sumber daya yang terdapat di Kota Palopo.

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Teori Keagenan

Teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi publik. Model agen prinsipal merupakan kerangka analitik yang sangat berguna dalam menjelaskan masalah insentif dalam institusi publik dengan dua kemungkinan kondisi, yakni terdapat beberapa prinsipal dengan masing-masing tujuan dan kepentingan yang tidak koheren dan prinsipal juga bisa bertindak tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat, tetapi mengutamakan kepentingan yang sifatnya lebih sempit. Hubungan keagenan dalam pemerintah dijalankan berdasarkan peraturan pemerintah daerah dan bukan semata-mata hanya untuk memenuhi kepentingan prinsipal saja (Verawaty et al., 2020).

Jika dikaitkan dengan kinerja keuangan daerah, pemerintah pusat merupakan prinsipal dimana pemerintah pusat adalah pihak yang bertindak sebagai pemberi perintah dan bertugas untuk mengawasi, memberikan penilaian dan masukan atas tugas yang telah dijalankan oleh pemerintah daerah. Jika kinerja keuangan daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah baik, kemampuan suatu daerah untuk mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah guna memenuhi kebutuhannya juga akan tercukupi dan tidak bergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah dapat diartikan sebagai pendapatan yang bersumber dari pungutan-pungutan yang dilaksanakan oleh daerah berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku yang dapat dikenakan kepada setiap orang atau badan usaha baik milik pemerintah maupun swasta karena perolehan jasa yang diberikan oleh pemerintah tersebut. Oleh sebab itu daerah dapat melaksanakan pungutan dalam bentuk penerimaan pajak, retribusi, dan penerimaan lainnya yang sah yang diatur dalam undang-undang. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan mengakibatkan peningkatan kinerja keuangan pemerintah (Prasasti & Sari, 2015).

Komponen Pendapatan Asli Daerah

Komponen-komponen dalam pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut: (Yunus, 2019)

1. Pajak Daerah
2. Retribusi
3. Perusahaan Milik Daerah
4. Pendapatan Asli Daerah yang sah

Belanja Modal

Belanja modal adalah komponen belanja langsung dalam anggaran pemerintah yang menghasilkan output berupa aset tetap. Dalam pemanfaatan aset tetap yang dihasilkan tersebut, ada yang bersinggungan langsung dengan pelayanan publik atau dipakai oleh masyarakat dan ada yang tidak langsung dimanfaatkan oleh publik. Dalam perspektif kebijakan publik, sebagian besar belanja modal berhubungan dengan pelayanan publik, sehingga pada setiap anggaran tahunan jumlahnya semestinya relatif besar (Abarca, 2021).

Jenis-Jenis Belanja Modal

Jenis-jenis Belanja Modal adalah sebagai berikut :(Abarca, 2021)

1. Belanja Modal Tanah
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
4. Belanja Modal Fisik Lainnya

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Halim (2004: 24) Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah hasil dari pengukuran untuk melihat kondisi keseluruhan ketercapaian pengelolaan keuangan atau pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah. Salah satu informasi yang dapat digunakan sebagai tolok ukur kinerja adalah informasi keuangan.

1. Rasio Ekonomis
2. Rasio Efisiensi
3. Rasio Efektivitas

Hipotesis

H₁ :Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah Daerah.

H₂ :Belanja Modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

H₃: Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal berpengaruh positif terhadap KinerjaKeuangan pemerintah Daerah.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini adalah kuantitatif. penentuan sampel yaitu data laporan realisasi APBD dikantor Badan pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palopo selama kurun waktu 10 tahun, yaitu dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2020. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Statistik Deskriptif

Tabel 1 Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pendapatan Asli Daerah	10	3570342151600.00	17720505245665.00	10810750744993.3000	5556535275183.37000
Belanja Modal	10	9309831767900.00	35366110066741.00	18273442872500.0000	9053877523477.99000
Kinerja Keuangan	10	5992.00	9426.00	8337.0000	1236.28799
Valid N (listwise)	10				

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa sampel berjumlah 20 (N) pada tiap-tiap variabel yang diteliti. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebagai variabel dependen memiliki nilai minimum sebesar 5992,00 persen dengan nilai maksimum sebesar 9426,00 Persen sedangkan nilai rata-ratanya (*mean*) sebesar 8337,0000 Persen dengan standar deviasi sebesar 1236,28799 Persen standar deviasi memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan dengan nilai *mean*, hal ini berarti bahwa simpangan data pada variabel Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah tidak terlalu besar. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa deviasi antara nilai minimum dan nilai maksimum pada periode pengamatan relatif rendah, sehingga dapat dikatakan baik karena tidak ada kesenjangan yang relatif besar antara nilai minimum dan maksimum Belanja Daerah.

Pendapatan asli daerah memiliki nilai minimum sebesar 3.570.342.151.600,00 dengan nilai maksimum 17.720.505.245.665,00 sedangkan nilai *mean* sebesar 10.810.750.744.993,3000 dengan standar deviasi sebesar 5.556.535.275.183,37000 standar deviasi memiliki nilai yang lebih kecil daripada nilai *mean*, hal ini berarti bahwa simpangan pada data tidak terlalu besar dari pendapatan asli daerah terendah dan tertinggi.

Belanja modal memiliki nilai minimum sebesar 9.309.831.767.900,00 dengan nilai sebesar 35.366.110.066.741,00 sedangkan nilai *mean* sebesar 18.273.442.872.500,0000 dengan standar deviasi sebesar 9.053.877.523 477,99000 Standar deviasi memiliki nilai yang lebih kecil daripada *mean*, dalam hal ini simpangan pada data tidak terlalu besar dari Belanja modal terendah dan tertinggi.

Uji Normalitas

Tabel 2 Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		10
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0.0000000
	Std. Deviation	1206.89925042
Most Extreme Differences	Absolute	0.252
	Positive	0.177
	Negative	-0.252
Test Statistic		0.252
Asymp. Sig. (2-tailed)		.072 ^c

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui bahwa nilai probabilitas *Asymp.Sig* (2-tailed) sebesar 0,072 lebih besar dari 0,05. Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas Kolmogorov-Smirnov Test dalam hal ini data berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Tabel 3 Uji Multikolinieritas

Model	Unstandardized Coefficients	Std. Error	Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
						B	Beta
1 (Constant)	8480.207	1058.834		8.009	0.000		
Pendapatan Asli Daerah	-7.341E-11	0.000	-0.330	-0.587	0.576	0.485	2.324
Belanja Modal	3.559E-11	0.000	0.261	0.463	0.096	0.657	2.324
a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan							

Berdasarkan tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami gangguan multikolinieritas, hal ini sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji multikolinieritas dengan melihat nilai Tolerance dan VIF. Berdasarkan outpunya nilai tolerance masing-masing variabel Pendapatan asli daerah (X1) dan belanja modal (X2)

sebesar $0,485 > 0,10$. Sementara nilai VIF untuk masing-masing variabel adalah $2,324 < 0,10$ yang artinya bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas.

Uji Autokorelasi

Tabel 4 Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.217 ^a	0.047	-0.225	1368.49512	1.858
a. Predictors: (Constant), Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah					
b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan					

Berdasarkan hasil uji autokorelasi menghasilkan nilai Durbin-Watson (DW) sebesar 1,858. Nilai tabel dengan menggunakan alpha 5% atau 0,05 dengan jumlah sampel sebanyak 10 dan jumlah variabel independent 2, maka pada tabel Durbin-Watson diperoleh $dL = 0,5253$ dan $dU = 2,0163$.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5 Uji Heteroskedastisitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8480.207	1058.834		8.009	0.000
	Pendapatan Asli Daerah	-7.341E-11	0.000	-0.330	-0.587	0.576
	Belanja Modal	3.559E-11	0.000	0.261	0.463	0.657
a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan						

Berdasarkan hasil output diatas diketahui nilai signifikan (sig) variabel pendapatan asli daerah (X1) adalah $0,576 > 0,05$ dan variabel belanja modal (X2) adalah $0,657 > 0,05$ maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji gletser, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Uji Regresi Berganda

Tabel 6 Uji Regresi Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8480.207	1058.834		8.009	0.000
	Pendapatan Asli Daerah	-7.341E-11	0.000	-0.330	-0.587	0.576
	Belanja Modal	3.559E-11	0.000	0.261	0.463	0.657
a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan						

Berdasarkan hasil analisis pada tabel diatas maka model untuk menguji Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Swasta mempengaruhi pertumbuhan Ekonomi selama periode 2011-2020 adalah sebagai berikut:

$$Y = 8480.207 - 7,34 + 3,55 + e$$

Interpretasi dari persamaan regresi linear berganda diatas adalah sebagai berikut:

1. Nilai konstanta (a) diperoleh sebesar 8480,207 artinya adalah variabel pendapatan asli daerah dan belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan Kota Palopo dengan nilai konstan atau sama dengan nol (0), maka kinerja keuangan nilainya sebesar 8480,207 (dalam persen).
2. Nilai koefisien regresi variabel pendapatan asli daerah (X1) sebesar 7,34 artinya bahwa setiap kenaikan satu satuan, maka akan diikuti penurunan jumlah kinerja keuangan sebesar -7,34 atau -7.341E-11 dengan asumsi variabel lain bernilai tetap.
3. Nilai koefisien regresi variabel belanja modal (X2) sebesar 3,55 artinya bahwa setiap kenaikan satu persen, maka akan diikuti dengan kenaikan jumlah kinerja keuangan sebesar 3,55 atau 3.559E-11 dengan asumsi variabel lain bernilai tetap.

Koefisien Determinan (R²)

Tabel 7 Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin Watson
1	.217 ^a	0.047	-0.225	1368.49512	1.858
a. Predictors: (Constant), Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah					
b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan					

Hasil pengujian koefisien determinasi pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R²* diperoleh sebesar -0.225. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dijelaskan oleh variabel bebasnya (independen), yakni: pendapatan asli daerah dan Belanja Modal yang diharapkan sebesar -22,5%. Maka sisanya sebesar 99,775% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian ini.

Uji Parsial (t)

Tabel 8 Uji Parsial (t)

Model		Unstandardized Coefficients	Std. Error	Standardized Coefficients	T	Sig.
		B		Beta		
1	(Constant)	8480.207	1058.834		8.009	0.000
	Pendapatan Asli Daerah	-7.341E-11	0.000	-0.330	-0.587	0.576

	Belanja Modal	3.559E-11	0.000	0.261	0.463	0.657
a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan						

1. Uji hipotesis Pendapatan asli daerah (X1) terhadap kinerja keuangan

Berdasarkan output tabel 4.12 dapat diketahui bahwa nilai t Hitung sebesar -0,587 dan nilai t Tabel sebesar 2,306 sedangkan nilai signifikannya sebesar 0,576 artinya bahwa nilai t Hitung < t Tabel dan signifikansi > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pendapatan asli daerah berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan.

2. Uji hipotesis belanja modal (X2) terhadap kinerja keuangan

Berdasarkan output tabel 4.12 dapat diketahui bahwa nilai t Hitung sebesar 0,463 dan nilai t Tabel sebesar 2,306 sedangkan nilai signifikannya sebesar 0,657 artinya bahwa nilai t Hitung < t Tabel dan signifikansi 0,657 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel belanja modal berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan.

Uji Simultan (F)

Tabel 9 Uji Simultan (F)

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	646219.794	2	323109.897	0.173	.845 ^b
	Residual	13109452.206	7	1872778.887		
	Total	13755672.000	9			
a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan						
b. Predictors: (Constant), Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah						

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai F Hitung sebesar 0,173 dan F Tabel pada tingkat signifikan 5% sebesar 5,32 sedangkan nilai signifikannya sebesar 0,845, maka dapat disimpulkan bahwa nilai F Hitung sebesar 0,173 < F Tabel sebesar 5,32 dan nilai sig 0,845 > 0,05 sehingga variabel pendapatan asli daerah dan belanja modal tidak simultan terhadap kinerja keuangan Kota Palopo.

Pembahasan

Berdasarkan Uji parsial (Uji T) di dapatkan nilai t hitung PAD sebesar -0,587 < nilai t tabel sebesar 2,306 dengan nilai signifikansi sebesar 0,576 > 0,05 yang berarti H1 ditolak, artinya Kinerja keuangan tidak dipengaruhi secara signifikan oleh PAD.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Mulyani (2017) yang menunjukkan kinerja keuangan dapat dipengaruhi secara negatif oleh PAD. Berdasarkan data penelitian, tingkat penerimaan pendapatan asli daerah di BPKAD Kota Palopo masih tergolong rendah sehingga

pengelolaan PAD sebagai input dalam pencapaian target pemda di BPKAD Kota Palopo dinilai kurang efisien serta tanggungjawab pemerintah daerah dalam pengelolaan potensi dan sumberdaya daerah melalui pajak dan retribusi masih rendah.

Berdasarkan Uji parsial (Uji T) didapatkan nilai t hitung belanja modal sebesar $0,643 <$ nilai t tabel sebesar $2,306$ dengan nilai signifikansi sebesar $0.657 > 0,05$. yang berarti H_2 ditolak, artinya Kinerja keuangan tidak dipengaruhi secara signifikan oleh belanja modal. Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Kota Palopo periode 2011-2020.

Hasil penelitian ini senada dengan hasil penelitian yang dilakukan Ni Putu Gina Sukma Antari (2018) yang mendapatkan hasil bahwa belanja modal berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pertumbuhan kinerja keuangan daerah secara langsung dikarenakan kinerja dari pegawai kurang maksimal dan anggaran belanja modal sering digunakan untuk kepentingan pribadi sehingga menimbulkan tindakan korupsi.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan yaitu mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (studi kasus Kantor BPKAD Kota Palopo). maka dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut.

Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negative dan tidak signifikansi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kantor BPKAD Kota Palopo. Berdasarkan data penelitian, tingkat penerimaan pendapatan asli daerah di Kantor BPKAD Kota Palopo masih tergolong rendah sehingga pengelolaan PAD dalam pencapaian target pemda di Kantor BPKAD Kota Palopo dinilai kurang efisien serta tanggungjawab pemerintah daerah dalam pengelolaan potensi dan sumberdaya daerah melalui pajak dan retribusi masih rendah.

Belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan BPKAD Kota Palopo. Hasil ini memberikan arti bahwa kegiatan belanja modal yang dilakukan

pemerintah daerah BPKAD Kota Palopo belum sepenuhnya mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan daerah BPKAD Kota Palopo.

Pendapatan asli daerah dan belanja modal secara simultan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah, karena pengelolaan PAD daerah belum optimal dan tidak serta merta dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah, dan belum mampu untuk menggali potensi-potensi daerah guna memperoleh PAD yang lebih besar, dan tidak semua kegiatan belanja modal mampu menghasilkan sumber-sumber keuangan secara langsung bagi daerahnya.

Saran

Pemerintah Daerah diharapkan bisa lebih inovatif dalam mencari pendapatan untuk daerah dengan mempergunakan Sumber Daya Alam seperti lahan-lahan kosong yang ada di Kota Palopo untuk meningkatkan pendapatan Asli Daerah dan belanja modal secara merata di BPKAD Kota Palopo supaya pertumbuhan pendapatan daerah semakin meningkat.

Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan variabel independen lebih banyak lagi karena masih banyak faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah dan menggunakan rasio keuangan daerah yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abarca, Roberto Maldonado. 2021. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi." *Nuevos Sistemas de Comunicación e Información* 2013–15.
- Abdullah. 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Lokasi Khusus terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota se- Sumatera Bagian Selatan. *Simposium Nasional Akuntansi 18, Universitas Sumatera barat, Medan 16-19 September 2015*
- Antari, (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen Unud*, 7 (2), hal.1080-1110.
- Aprilianda, Gusti Made Ayu. 2016. "Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Propinsi Jawa Timur." *Forum Bisnis Dan Kewirausahaan Jurnal Ilmiah STIE MDP Hal -39 2(1):39–51*.
- Azhar, I. 2021. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Langsa" Universitas Samudra, Langsa, Aceh Timur, Indonesia.
- Batubara, Dian Nofrina. 2009. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja*

Keuangan pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Utara. Skripsi, Universitas Sumatera Utara, Medan (<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/19120/7/Cover.pdf>, diakses tanggal 4 Desember 2010).

- Darwanis dan Ryanda Saputra. 2014. Pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Dampaknya pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 1 (2): 183-199.
- Dwi Saraswati, Yunita Sari Rioni, S. 2019. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage, Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah." *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik* 9(2):110-20.
- Fajar Nugroho dan Abdul Rohman. 2012. *Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus di Propinsi Jawa Tengah)*. Diponegoro Journal of Accounting, Vol. 1 No. 2.
- Ghozali. I. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariante dengan program SPSS*. Edisi V. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah, Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, dan Kusufi. 2012. *Pengeluaran Belanja Modal*. Penerbit Buku Kompas. Jakarta.
- Halim, 2007. *Akuntansi Sektor Publik Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Jauhar, Fauzan. 2016. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kab/Kota Sumatera Barat." *Jurnal Akuntansi* 1(2):61-70.
- Mulyani, Sri dan Hardiyanto Wibowo. 2017. Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, Intergovernmental Revenue dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan. *Kompartemen*, 15 (1): 57-66.
- Mahmudi. 2009. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Priyatno, D. 2012. *Cara Kilat Belajar Analisis Data Dengan SPSS 20*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Pratiwi, T. Y. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012-2016. *Program Studi Akuntansi Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta 2018*.
- Prasasti, S., & Sari, R. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Diy Tahun 2007-2013). *Akmenika: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 12(1), 1-13.

- Prastiwi, Nanda Dipa, and Andri Waskita Aji. 2020. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Keistimewaan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah." *Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha* 28(1):89–105. doi: 10.32477/jkb.v28i1.45.
- Putri, N. K. N. I., & Darmayanti, N. P. A. (2019). Pengaruh Pad Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 8(5), 2834.
- Rochmah, S. N. (2015). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2012)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Sari, Ni Made Diah Permata, and I. Ketut Mustanda. 2019. "Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah." *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana* 8(8):4759. doi: 10.24843/ejmunud.2019.v08.i08.p02.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dab R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukma, Antari Ni Putu Gina, and Ida Bagus Sedana Panji. 2018. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali Tahun 2011-2015)." *E-Jurnal Manajemen Unud* 7(2):1080–1110.
- Supriyadi, E. (2014). *SPSS+ Amos Statistika Data Anaylisis*. Jakarta: Penerbit IN MEDIA.
- Verawaty, V., Jaya, A. K., Puspanita, I., & Nurhidayah, N. (2020). Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. *Mbia*, 19(1), 21–37. <https://doi.org/10.33557/mbia.v19i1.560>
- Widarjono. Agus. (2010). *Analisis Statistika Multivariat Terapan. Edisi pertama*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Yunus, Muhammad Kafrawi,. 2019. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Kinerja Keuangan Toraja." *Economics Bosowa Journal Edisi Xxix* Januari s/d Maret 2019. 5(001):14–32.